



LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK PERSIAPAN PEMILU 2019 DI KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR TANGGAL 14 MARET 2019

I. PENDAHULUAN

Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Bupati Mojokerto untuk memantau persiapan Pemilu 2019. Pemantauan ini dilakukan sebagai salah satu langkah pengawasan Komisi II DPR RI.

Persiapan Pemilu 2019 yang dilakukan secara serentak harus diimbangi dengan kesiapan setiap daerah untuk melaksanakan proses persiapan Pemilu 2019 serta koordinasi yang terus menerus antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait KTP el. Dan persiapan penyelenggara pemilu baik pusat dan daerah, dalam hal ini KPU beserta jajarannya dan Bawaslu beserta jajarannya.

Secara khusus Kunjungan Komisi II DPR RI ke Kabupaten Mojokerto juga ingin melihat DPT yang telah ditetapkan KPU Mojokerto, perkembangan DPTb (tambahan) dan DPK (khusus). Sejauhmana persiapan pemilu di Lapas dan Rumah Sakit, serta update logistik pemilu. Sedangkan dengan Bawaslu mengetahui perkembangan penyelenggara pemilu ad hoc, khususnya pengawas TPS dan perkembangan Gakumdu.

II. Hasil Kunjungan

Pertemuan yang dilakukan di ruang rapat Wakil Bupati Mojokerto dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Agus Mohammad Anas Edi Santosa, SH, MM. Kemudian dilanjutkan perkenalan Anggota Tim Kunspek oleh Ketua Tim Dr. Nihayatul Wafiroh, MA.

Sambutan Asisten I Pemerintahan dan Kesra Kab. Mojokerto Agus Mohammad Anas Edi Santosa, SH, MM. Asisten I Pemerintahan dan Kesra Kab. Mojokerto mengucapkan terimakasih atas kunjungan ke Kabupaten Mojokerto, dan mempersilahkan kepada Tim Kunjungan Kerja Spesifik Pemilu 2019 untuk meminta perkembangan persiapan dan kesiapan pemilu 2019 kepada pihak Disdukcapil Kab Mojokerto dan juga pihak terkait yakni KPU Mojokerto dan Bawaslu Mojokerto.

Sambutan Ketua Tim Kunspek Dr. Nihayatul Waghfiroh, MA

Terim kasih atas kesempatannya, kunjungan kali ini adalah untuk mendapatkan masukan dari daerah karena kemarin tanggal 13 maret dalam RDP dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU RI dan Bawaslu RI 2019 ada berbagai persoalan terkait yang dipending. Persoalan yang dibahas kemarin adalah DPT ganda, KTP el, KTP untuk orang asing. Rapat tersebut kita tunda pekan depan. Untuk itu pada kunspek kali ini ingin mendapatkan masukan dari Pemerintah kabupaten Mojokerto, KPU Jatim dan Mojokerto, Bawaslu jatim dan Mojokerto.

Pemaparan Instansi di Kabupaten Mojokerto

KPU Mojokerto

Sesuai keputusan terakhir DPT di Kabupaten Mojokerto berjumlah 800 ribu lebih, tepatnya sebanyak 831.172. Penetapan tersebut berdasarkan dpthp perbaikan 2. Penetapan tersebut penting agar kita bisa menghitung dengan tepat untuk penyebaran logistik. Tentu nanti akan diputuskan oleh KPU RI lewat KPU provinsi Jatim.

Selanjutnya terkait masalah DPTb, kami sudah mendapat formulir A5, mereka adalah para santri-santri dari pesantren yang ada di Kabupaten Mojokerto dan mahasiswa Sekolah Tinggi Injil mereka berasal dari Sumatera Utara, NTT, Sulawesi Utara. Untuk itu, kami telah mengecek ke DPT KPU RI apakah mereka masuk dalam DPT, dan sampai saat ini jumlah yang pindah memilih dari Mojokerto keluar Mojokerto jauh lebih besar. Yang pindah memilih dari luar Mojokerto ke Mojokerto berjumlah 60 orang dari Sekolah Tinggi Injili. Pindah pemilih dari luar Mojokerto sebanyak 1076 orang. Yang keluar Mojokerto sebanyak 1265 orang. Pemilih yang ada Lapas sebanyak 536 sedangkan daftar pemilih khusus sebanyak 499 orang.

Logistik kotak pemilu dan bilik suara sudah diterima dan sudah dirakit, tempatnya kami dibangunkan satu gudang, dan gudang tambahan dengan sewa, gor, gor desa suko, gor di tambak agung. 2000m². Sortir surat suara telah selesai maka pengepakan di tambak agung. Kami lapis dengan plastik e cara berlapis dan nanti dikunci kapetis bukan gembok. Surat suara sudah kami terima terakhir dpr ri sesuai dengan dpt.

Sortir, kerusakan tidak begitu besar, dari 800 tidak lebih 6010 yang rusak, bukan rusak sobek, lebih banyak bercak tinta. Mungkin masih terlipat dalam kondisi basah. Sortir dan suart suar pilpres, kemudian dpd, dan terkahir

Formuli masih menunggu turuan dan C 1 plano. Setelah selesai dan sesuai peruntukannya ditutup dengan stripping

Kurang 300 kotak suara surat u ppk. Tidak semua bilik suara memakai karton sebagian dengan alumunium.

Bawaslu Mojokerto

3225 pengawas tps sudah terpenuhi, kami siap melantik mereka. Kami bersinergi dengan KPU agar tidak terlalu rame di media.

Kami meminta pemutkahiran data ke KPU, pengawasan WNA di Mojokerto hasilnya 19 WNA tidak masuk dalam DPT, proses pelanggaran masa kampanye, sentra gakumdu solid, puncaknya kami menerima tindak pidana pemilu kades dalam kampanye cawapres, tidak ada perbedaan iqnifikan mungkin sehingga vonis 2 bulan dan 6 juta rp.

Penindakan pelanggaran administrasi ada sebanyak 161, penertiban APK yang melanggar sebanyak 1603 buah untuk penyopotan dilakukan kerjasama dengan satpol pp, polri, dan tni.

Netralitas ASN, kami sudah mengingatkan pada pemkab, sosialisasi tenan netralitas ASN lewat dinas-dinas yang ada di pemkab. Kami mengatakan agar pilihan para ASN silahkan diekspreikan di bilik suara. Selain itu kami juga mengajak mereka untuk mengawasi tiap tahapan pemilu.

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mojokerto

Di Kabupaten Mojokerto 100 % sudah KTP el. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.120.249 sedangkan yang memiliki hak pilih sebanyak 851.490. Untuk KTP el yang sudah tercetak sebanyak sudah cetak 853.499. Adapun yang belum tercetak sebanyak 251 buah.

Pada bulan maret perekaman sebanyak 265. Dan kami sudah siap cetak. Karena kami telah dikirim 8000 blangko ktp. Untuk penduduk yang berusia 17 tahun pada hari pemilihan kami harus menyiapkan KTP nya. Untuk itu saat ini kami kerja bareng antara kpu, bawaslu untuk menyiapkan itu semuanya.

Pertanyaan Anggota Tim Kunspek

1. Agus Makmur

- a. Seharusnya KPU harus detil memberikan laporan, seperti Bawaslu telah memberikan laporan, agar supaya aparat keamanan dapat berperan dalam pengamanan
- b. Tabrani
- c. Mengapa DPT koq ada perbedaan dengan wajib KTP? Untuk harus dipersiapkan pada hari H kalau mereka bawa KTP el, bagaimana yang harus dilakukan oleh para KPPS?
- d. Bagaimanan Bawaslu melakukan penindakan 1603 APK? Apakah termasuk yang berbayar
- e. Bagaimana sentra gakumdu?
- f. Seperti bagaimana pengamanan di tiap tps?
- g. Bagaimana penyebaran formulir C 6, supaya sampai ke lokasi karena khawatir ada permainan karena ada yang takut kalah?

2. Siti Sarwindah
 - a. Sentra gakumdu harus hadir dalam pertemuan ini, supaya kita mendapatkan penjelasan terkait keamanan karena sekarang pemilu paling ribet karena menggabungkan pileg dan pilpres. Maka keamanan perlu di tingkatkan, karena ketika perhitungan suara di tps rawan.
 - b. Berdasarkan laporan ada selisih 499 sudah punya KTP tapi belum masuk DPT, bagaimana penjelasannya?
 - c. Sejauhmana pelayanan A5 serta bagaimana ketersediaan kertas suara untuk pemilih tambahan? bagaimana dengan surat suara yang rusak kemana diserahkan pada siapa?
 - d. Bagaimana dengan sosialisasi pemilu apakah sudah sampai ke bawah? Misalnya bagaimana mencoblosnya, apakah sudah dilakukan simulasi agar bisa memprediksi kelancaran pemungutan suara?
 - e. Bagaimana dengan DPT ganda adakah di Mojokerto?
 - f. Bagaimana yang di lapas dalam pemungutan suara?
 - g. Bagaimana dengan orang sepuh di pedesaan mereka sudah paham dengan cara pencoblosan, apakah bisa didampingi oleh keluarganya?

3. Afdzal Mahfudz
 - a. Jangan sampai penyelenggara pemilu tidak netral, karena hal itu akan menyuburkan money politic. Pemilu ini milik rakyat jangan sampai ternodai hal tersebut
 - b. Penegakkan aturan, uu pemilu, perbawaslu, bukan cara untuk atas dasar penegakkan hukum bukan untuk mencari kesalahan. Kadang tidak sinkron pemahaman antara penyelenggara pemilu, kita harapkan tidak terjadi chaos dalam pemilu.

4. Andi Mariatang
 - a. Bagaimana dengan perekutan pengawas TPS bagaimana koq bisa cepat? bagaimana sosialisasi di *grass root* dengan DPT yang cukup besar, bagaimana dengan sosialisasi untuk lansia karena mungkin saja penglihatan mereka sudah kabur, kalau pemilih pemula kan sudah siap
 - b. Bagaimana sosialisasi terhadap Caleg DPR Pusat, karena kadang partisipasi pemilihnya rendah ketimbang caleg setempat. Maka perlu sosialisasi penting mencoblos 5 kertas suara
 - c. Apakah masalah honor di PPS, KPPS, dan PPK?
 - d. Apakah ditemukan pelanggaran tentang barang kampanye cinderamata karena tiap daerah berbeda?
 - e. Bagaimana persiapan TPS di lapas, rumah sakit?
 - f. Bagaimana SOP untuk logistik pemilu yang rusak?

Jawaban

KPU Jawa Timur

Sampang DPT nya hampir sama dengan jumlah penduduk, ternyata setelah cokolit betul, jadi kondisinya seperti itu kami selalu disalahkan adanya DPT ganda, 200 ribu katanya ganda misalnya ada laporan DPT ganda sebanyak 131 ribu ketemu 200 yang ganda. Maka kami katakan laporan Tim BPN banyak yang tidak sesuai fakta. Contoh ada DPT ada bintang 4 itu data lama.

Ada kesalahan teknis sedikit2, tapi sejauhnyanya kita sudah bekerja sebaik mungkin , kita punya pokja dengan dukcapil, persoalannya kami tidak punya akses data siak , kita bisa hanya cek data NIK

DPTb, per tanggal 18 Feb, tahap 261.719. Pemilih pindah di daerah pendidikan dan pesantren di Malang, Surabaya, basis pesantren. Jadi 100 ribu pemilih, jadi kami membuka posko pemilih pindahan semakin ramai sekali. Kemungkinan ada 217 TPS tambahan untuk DPTb namun semua akan tergantung situasi terakhir, namun secara umum bila pemilih tambahan terkonsentrasi di suatu tempat tertentu maka boleh dibuat TPS tambahan seperti di kampus, lapas, panti jompo, pesantren.

Selain itu ada laporan ada pemilih di atas 90 tahun, pemilih dibawah 17 tahun semua faktual sesuai fakta lapangan. Selanjutnya ada WNA yang masuk 27 masuk DPT. Telah diverifikasi sebanyak 16 setelah didalami ternyata tinggal 15, terakhir ada tambahan 12 WNA masuk DPT. Semua WNA yang masuk DPT sebanyak 27 sudah dicoret. Memang mereka itu bukan orang eropa, mereka WNA dari Asia Tenggara yang sudah lama tinggal mereka dari Singapura, dan Malaysia.

Sekarang petuga KPPS seluruh Jatim sebanyak 1,1 juta

Logistik surat suara perhari ini telah sampai ke Kabupaten/Kota kecuali Nganjuk, Pacitan dan Bojonegoro belum terkirim, yang lain sudah tercukupi. Untuk logistik yang rusak akan dimusnahkan oleh KPU kab/kota. Untuk pencetakan formulir C6 baru kita sampaikan ke percetakan, karena gagal lelang dengan PL. Untuk formulir pendampingan C3 sudah dicetak. Yang belum adalah pencetakan C1-C7, kami sudah memohon-mohon kepada para percetakan agar mau mencetak.

Bawaslu Jawa Timur

Kalau ada perbedaaan data jumlah TPS kami dengan karena KPU terjadi karena KPU masih ragu tentang adanya pemilih tambahan, sementara kami memperkirakan ada tambahan TPS sehingga kami berbeda.

Pengawas TPS seluruh Jatim kami kekurangan 2000 kami nunggu RDP di DPR untuk pengurangan syarat pengawas TPS. Pengawas TPS harus ada tidak boleh melanggar UU, mungkin nanti akan dicarikan antar desa.

Selanjutnya ada Bimtek saksi parpol, berbasis kecamatan yang ditargetkan 117 ribu ternyata hanya 5% dari jumlah saksi seluruhnya. Mungkin sebaiknya penyelenggaraan per kec, dan dilaksanakan oleh partai. Sehingga Bawaslu yang datang mengisi.

KPU Mojokerto

Di Mojokerto ada 304 desa dengan DPT sejumlah 831172 dan jumlah TPS ada 3.221. Selanjutnya ada TPS tambahan terkait dptb, 2 TPS pacet, 1 TPS jatirejo. Untuk pemilih tambahan kalau jumlahnya tidak banyak di satu tempat maka akan disebar Kita juga mendata orang meninggal sehingga DPT yang ada valid. Kami juga sudah menyebarkan DPTb secara dini, sehingga C6 bisa disebar pada waktunya.

Penyelenggara pemilu ad hoc seperti PPK dan PPS sudah selesai, jumlah petuga KPPS sebanyak 20.547 ditambah petugas 2 pam per TPS. Sekarang sudah dilakukan tes terhadap petugas KPPS. Kita membuka rekrutman petugas secara terbuka, dan yang melamar ternyata banyak.

Logistik pemilu, telah dilakukan pelipatan dan sortir logistik pemilu. Dalam proses tersebut kami melibatkan bawaslu untuk mengawasi. Daftar Pemilih Khusus (DPK) mereka adalah pemegang KTP el tapi belum masuk DPT.

Rumah sakit dilayani TPS sekitar RS, karena jarang pasien bawa A5, jadi pemilih adalah petugas medis yang mengurus A5. Sampai saat ini honor kpps belum jelas jumlahnya.

Bawaslu Mojokerto

Pada tanggal 23 Nov 2018, ada kunjungan Cawapres 02 di Sampang Agung, Kades Sampang Agung dan jajarannya menyambut dengan organ tunggal, dan pengerahan massa, dan dengan baliho. Ketika jam 14.00 Cawapres 02 datang maka dilakukan penyambutan oleh kades dan jajarannya. Dengan kondisi tersebut sesuai dengan Pasal 490 yang mengatur pejabat tidak boleh menguntungkan atau merugikan paslon. Karena sudah masuk tindak pidana pemilu maka Kades tersebut diproses oleh gakumdu. Dan telah di pidana kurungan. Peristiwa ini telah menjadi yurisprudensi yang lain. Sehingga bila ada maka kita mengingatkan peristiwa Kades Sampang Agung.

Direktur Teknologi Informasi Ditjen Dukcapil Kemendagri

Mojokerto sudah lebih baik dari yang lain, KTP el sudah selesai. Kab. Mojokerto adalah satu dari 28 Kota/Kab yang telah menuntaskan penyetakan KTP el. Tentu Dengan pengecualian penduduk yang akan berusia 17 tahun pada tgl 17 April besok akan memiliki ktp. Dengan ada sisa blangko sebanyak 8000 maka hal tersebut dapat teratasi untu 17 April besok.

Berdasarkan peninjauan saya, maka petugas di Mojokerto tidak lebih 30 menit perekaman dan percetakan.

Kami sudah minta Disducapil untuk menyisir ke kampus, sekolah, pesantren. Untuk melakukan perekaman di mana saja, tidak harus di domisili.

Untuk Prov Jatim ada 6 Kab/Kota yang belum selesai mencetak kita targetkan maksimal 20 maret. Dari 6 Kab/Kota tersebut, 4 kab mencetak di Jakarta. Kondisi terakhir, Kab. Bangkalan sudah selesai sehingga di Jakarta tinggal 3 Kab yang belum selesai mencetak.

III. Penutup

Acara ditutup oleh Ketua Tim Kunspek Komisi II DPR RI Dr. Nihayatul Wafiroh, MA. Dan meminta Pemerintah Kabupaten Mojokerto, KPU Mojokerto, dan Bawaslu Mojokerto untuk melakukan koordinasi yang baik sehingga persiapan Pemilu 2019 berjalan lancar sesuai harapan semua pihak

